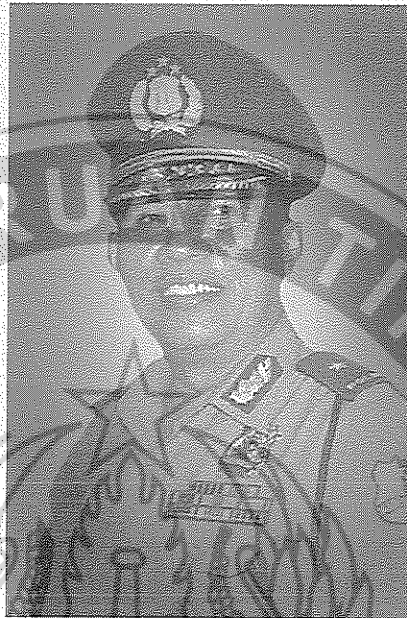


Kemandirian Polri dalam Penegakan Hukum

Oleh: Drs. R. Abdussalam, SH, MH

Kemandirian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum tidak dapat dilepas atau dipisahkan dari komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana. Kemandirian muncul dengan sendirinya tanpa ada intervensi dari pihak manapun, terutama pemerintah, untuk menghentikan proses penegakan hukum atau merekayasa hukum.



Selain itu juga Polri mandiri tidak dapat melepaskan diri dari sistem hukum yang berlaku universal, yang terdiri dari elemen materi hukum, sarana dan prasarana, anggaran serta budaya hukum. Tiap elemen saling mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Bila saling mendukung setiap elemen tersebut, maka pelanggaran HAM tidak akan terjadi, kepastian hukum semakin terjamin dan terwujud keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.

Sebab itu, timbul pertanyaan sejauh mana kemandirian Polri dalam penegakan hukum pada masa kini? Kemandirian Polri yang bagaimana dalam penegakan hukum di masa mendatang?

Penegakan hukum masa kini

Hampir semua produk peraturan perundang-undangan hukum termasuk dalam jenis hukum represif, karena dibuat oleh pemerintah dan DPR-RI sebagai lembaga legislatif yang hanya menyetujui dan mensah-

kan. Sebab itu, materi-materi hukum antara undang-undang satu dan undang-undang lain saling tumpang tindih dan bertentangan serta masih ada kecenderungan tiap-tiap departemen ingin memiliki kewenangan penegakan hukum sendiri-sendiri, tidak mengikuti sistem peradilan pidana. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) semakin tinggi, kepastian hukum, ketertiban dan keadilan sulit diwujudkan.

Jadi fungsi DPR-RI hanya menjadi justifikasi keputusan pemerintah yang telah diubah menjadi materi-materi hukum. Seharusnya DPR-RI mempelajari dan menilai setiap materi hukum yang diajukan pemerintah, apakah materi hukum itu telah melindungi hak asasi manusia (HAM), menjamin kepastian hukum, mewujudkan kebenaran dan keadilan? Bukan justru menjustifikasi keputusan politik pemerintah yang bertentangan dengan HAM, kepastian hukum dan keadilan.

Yang lebih aneh lagi materi hukum yang berada di bawah hirarki perundangan dapat mengalahkan materi hukum yang lebih atas yang seharusnya tidak boleh bertentangan. Tapi, hal ini dibiarkan dan dibiarkan oleh badan legislatif dan badan yudikatif.

Dengan pembiaran dan pendiaman dari badan legislatif dan yudikatif sama dengan menjustifikasi. Karena itu, materi hukum yang demikian sangat mempengaruhi kemandirian Polri dalam penegakan hukum. Contoh Polri dalam penegakan hukum Undang Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, dan Undang Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ternyata mendapat protes dan unjuk rasa terutama LSM-LSM, mahasiswa-mahasiswa bahwa undang-undang tersebut tidak dapat diterima dan tidak berlaku. Alasannya, bukan melindungi hak-

hak asasi manusia, bahkan ada yang melakukan tindakan kerusuhan, pengrusakan.

Anehnya lagi pembuat undang-undang—beberapa anggota legislatif dan pejabat pemerintah—menge-luarkan pernyataan bahwa Polri dalam melaksanakan penegakan hukum tidak komunikatif, tidak kompromi dan manusiawi. Akhirnya, Polri enggan untuk bertindak tegas, selama masyarakat belum mendukung sepenuhnya dalam melakukan penegakan hukum.

Polri—dalam melaksanakan penegakan hukum—melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku-pelaku kriminal massal seperti pengrusakan, pembakaran, penganiayaan dan penjarahan. Ternyata masyarakat berbalik mengadakan unjuk rasa yang diikuti dengan kerusuhan dan meminta kepada Polri untuk melepaskan tahanan-tahanan tadi. Karena Polri tidak memenuhi permintaan masyarakat maka masyarakat pun mengamuk, melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap kantor-kantor Polri.

Rupanya Polri tetap tegar dan semua anggota masyarakat yang terlibat dalam tindakan kriminal itu diproses hukum dan dilimpahkan kepada penuntut umum. Sayang, hakim menjatuhkan hukuman terlalu ringan, tidak seimbang dengan akibat yang ditimbulkan. Hal ini sangat mempengaruhi usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Efek mencegah dan efek jera dari putusan hakim tersebut masih belum ada sampai saat ini. Sehingga, tujuan sistem peradilan pidana tidak tercapai. Sarana, prasarana dan anggaran dalam penegakan hukum sangat tidak mendukung dan tidak memadai, sehingga muncul pemeo hilang ayam menjadi hilang kambing.

Pasalnya, proses penegakan hukum begitu mahal dan lama serta belum dapat menyelesaikan masalah bahkan semakin jauh untuk mendapatkan keadilan. Ditambah lagi masih adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa atau yang memiliki kekuatan. Bila tidak diikuti maka jabatan yang dipertaruhkan. Kalau ingin selamat dan mendapat jabatan, maka satu-satunya jalan harus meng-

ikuti pesanan-pesanan dari yang berkuasa tersebut.

Penegakan ke depan

Kemandirian Polri dengan struktur yang lepas dari TNI, bukan me-

Kemandirian Polri dalam penegakan hukum dapat melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan. Hal ini bisa dilakukan bila didukung oleh pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan keadilan serta tidak menghasilkan materi hukum saling tumpang tindih dan bertentangan.

rupakan departemen atau lembaga non-departemen sendiri. Tapi, sebagai lembaga negara yang setingkat dan sejajar dengan Kejaksaan Agung, TNI, Mahkamah Agung, dan Kapolri seharusnya diangkat oleh Presiden RI atas persetujuan DPR RI. Penyelenggaraan pembinaan kemampuan dan operasional Polri,

terutama penegakan hukum, dipengang langsung oleh Kapolri.

Polri dalam proses penegakan hukum tetap terpadu dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil. Semua tindakan-tindakan Polri harus berdasarkan asas legalitas dan asas kewajiban, walaupun ada intervensi dari manapun, baik pemerintah maupun kelompok penekan (*pressure groups*) yang berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum tanpa berdasarkan hukum.

Kemandirian Polri dalam penegakan hukum dapat melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan. Hal ini bisa dilakukan bila didukung oleh pembangunan materi hukum yang diarahkan untuk melindungi HAM, menjamin kepastian hukum dan keadilan serta tidak menghasilkan materi hukum saling tumpang tindih dan bertentangan.

Dengan Hukum Acara Pidana yang *integrated* (terpadu) melalui satu pintu yang saling berhubungan dalam bejana berhubungan tanpa adanya beberapa kewenangan diberikan dalam satu tangan, yang sulit untuk dikontrol dalam proses penegakan hukum. Bahkan, Lord Acton menjelaskan bahwa *Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (Kekuasaan cenderung untuk melakukan korupsi dan kekuasaan yang absolut berarti korupsi absolut pula).

Karena itu, materi hukum sangat penting sekali dalam kemandirian Polri. Selain itu juga harus didukung dengan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai serta budaya hukum masyarakat baik supra maupun infrastruktur yaitu kepatuhan, ketaatan dan kesadaran hukum sesuai dengan pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Kemandirian Polri dalam penegakan hukum tidak dapat dipisahkan sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana dan tidak dapat dilepaskan dari elemen-elemen sistem hukum yang berlaku universal, karena komponen-komponen dalam sistem hukum tersebut memberikan warna atas kemandirian Polri dalam penegakan hukum. ■

Maudy Koesnaedi

“Polri Dikritik, Berarti Masyarakat Masih Peduli”

Reformasi harus menjamah ke segala bidang, tak terkecuali ke tubuh Polri. Kalau ingin maju, polisi harus melakukan reformasi. “Kalau *nggak* begitu, bisa-bisa polisi tak berwibawa di mata masyarakat,” tutur Maudy Koesnaedi, yang terkenal sebagai Zainab dalam sinetron *Si Doel Anak Sekolahan* di sela-sela peluncuran sinetron *Camelia* di SCTV Jakarta, pekan lalu.

Polri ke depan harus bisa memenuhi tuntutan masyarakat. “Polisi harus benar-benar dekat dengan rakyat—jangan kampanye hanya di mulut atau cuma slogan saja. Itulah harapan

penduduk Indonesia,” papar artis yang kini sibuk dalam sinetron *Camelia*.

Wanita lajang nan cantik ini mengakui setelah reformasi digulirkan, perubahan mulai terlihat di tubuh Polri. Paling tidak di jalan-jalan polisi sudah tidak ‘segalak’ dulu lagi. Para petugas di lapangan mulai sadar untuk tidak menggunakan cara-cara lama. “Dulu kan terlihat tampang polisi sangar-sangar, sedikit-sedikit mereka menggunakan kekuasaannya. Sekarang gaya begitu sudah *nggak* laku.”

Paket *Hallo Polisi* atau paket *Patroli* yang ditayangkan di televisi menurutnya merupakan wujud nyata Polri merespon berbagai keluhan masyarakat. “Acara *Hallo Polisi*, merupakan paket menarik, karena dari situ kita bisa berinteraksi secara langsung dengan polisi dan menyampaikan kritik-kritik tentang perilaku dan kinerja mereka. Program ini bagus sebagai sarana introspeksi diri,” ujarnya sembari menambahkan kalau kinerjanya dikritik buruk, ya jangan marah. Masyarakat mau mengkritik berarti masih peduli.

Ihwal pengalamannya dengan polisi, menurutnya wajar-wajar saja. Saat syuting sinetron di Bundaran Hotel Indonesia, ia sempat ngobrol-ngobrol bahkan tukaran alamat dan nomor telepon dengan polisi di sana, katanya.

Menurutnya memperbaiki citra polisi yang sempat terpuruk, memang tidak mudah. Lalu apa sarannya?

Acara *Hallo Polisi*, merupakan paket menarik, karena bisa sebagai sarana introspeksi diri. Kalau kinerja Polri dikritik buruk, ya jangan marah. Kalau masyarakat masih mau mengkritik polisi, berarti masih peduli.

“Polisi harus dekat dengan rakyat. Dalam melakukan pendekatan dengan rakyat polisi jangan menggunakan kekerasan, tapi persuasif,” kata Maudy yang menurut rencana tahun 2000 mengakhiri masa lajangnya.

Ngomong-ngomong tentang kehidupan pribadinya, ia mengaku tahun ini ia memang sibuk berat, lantaran terikat kontrak pembuatan beberapa sinetron, belum lagi untuk model iklan dan MC. “Tahun 2000 saya akan melakukan perenungan. Tahun ini saya tinggal menyelesaikan tiga sinetron, yaitu *Camelia*, *Si Doel Anak Sekolahan V* dan *Jangan Ucapkan Cinta*. Selesai itu saya akan berhenti main sinetron, dan tahun depan akan banyak istirahat,” tutur pembawa acara *Gebyar BCA* yang lagi menjalin cinta dengan drummer Gilang Ramadhan ini. ■

Selamat & Sukses
Atas terpilihnya
Bapak K.H. Abdurrahman Wahid

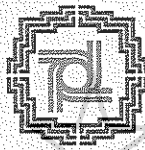
Sebagai
Presiden Republik Indonesia
Masa Bhakti 1999 - 2004

Beserta
Ibu Megawati Soekarnoputri

Sebagai
Wakil Presiden Republik Indonesia
Massa Bakti 1999 - 2004

Semoga diberikan kekuatan lahir dan batin, untuk menunaikan tugas negara dalam mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia

Komisaris Direksi, Staf dan seluruh Karyawan

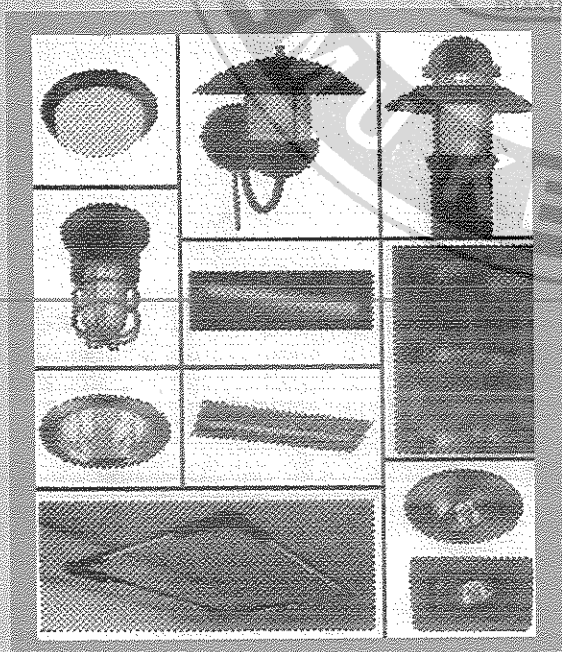


PT. DANAYASA ARTHATAMA

GEDUNG ARTHA GRAHA 12TH FLOOR KAWASAN NIAGA TERPADU SUDIRMAN (SCBD)
JL. JEND SUDIRMAN KAV. 52 - 53 JAKARTA 12190 - INDONESIA
TEL. (021) 515 2390 FAX: (021) 515 2391

E X C L U S I V E A R T S

ARTOLITE
 DESIGN • FUNCTION • SAFETY



HEAD OFFICE

Jl. Tangga Kehon Lurus Kav. AA VI No. 1 - 3
 Raya Menteng Jakarta 11620
 Telp. (021) 5964888 (Planning) Fax. (021) 5859781 - 02

ARTHOLITE SHOP :

• Jakarta

Dua Melin Blok C No. 10 Jakarta Pusat
 Telp. (021) 5342624 - 6941947 - 6387685 Fax. (021) 5342155
 Perumahan Kencana Bumi Indah Blok C No. 15 Blok D Jakarta Pusat
 Telp. (021) 5914258 - 7914472 Fax. (021) 3014472
 Komplek Tebetok Kencana Mas Jl. Kencana Raya No. 101 Blok E 14-15 Jakarta Pusat
 Telp. (021) 51904635 Fax. (021) 937978

Jl. Puncung Jaya No. 49 Jakarta Barat
 Telp. (021) 6001320 - 6751571 - 6251579 Fax. (021) 6251223

Jl. Tamirayat No. 14C Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7513772 - 7653081 Fax. (021) 7413772

Jl. Pondok Pinang Kav. No. 34 Jakarta Selatan
 Telp. (021) 7044831 - 7398915 Fax. (021) 7398915

Komplek Kencana Permai 106/118 Pondok
 Telp. (021) 4200396 Fax. (021) 4209510

Jaya Utara No. 48 A Depok Barat
 Telp. (021) 8226197 Fax. (021) 8226197

PT. Paszoda Cakrawala Lencana Komplek Dua Rusa Blok IV ABC Depok Barat
 Telp. (0361) 207361 Fax. (0361) 286394

Jl. Jend. Sudirman R. 11 No. 26 Balikpapan
 Telp. (0542) 22945 Fax. (0542) 35576

TOP LIFE Jl. TGH Pasia Perkebunan Swala Wadon Lombok
 Telp. (0370) 671574 Fax. (0370) 626800

Jl. Pardi No. 71B Medan
 Telp. (061) 579926 Fax. (061) 573558

Jl. Sora Rajasa No. 122 Manado
 Telp. (0431) 859173 Fax. (0431) 859174

OK Wilakanda Widyaya Jl. Jend. Sudirman 285 Pekanbaru
 Telp. (0761) 30488 Fax. (0761) 42828

Jl. Jend. Sudirman No. 134 Palembang
 Telp. (0711) 372646 Fax. (0711) 372646

PT. Jinh Anugerah Rantai Jl. Batang Arau 88/811 Padang 25118
 Telp. (0751) 33798 Fax. (0751) 25906

Jl. Veteran No. 48-50 Pontianak
 Telp. (0561) 37909 - 60000 Fax. (0561) 58000

Jl. Pasar Besar Vlehan 32/1 Surabaya
 Telp. (031) 3529101 - 3539926 Fax. (031) 3532885

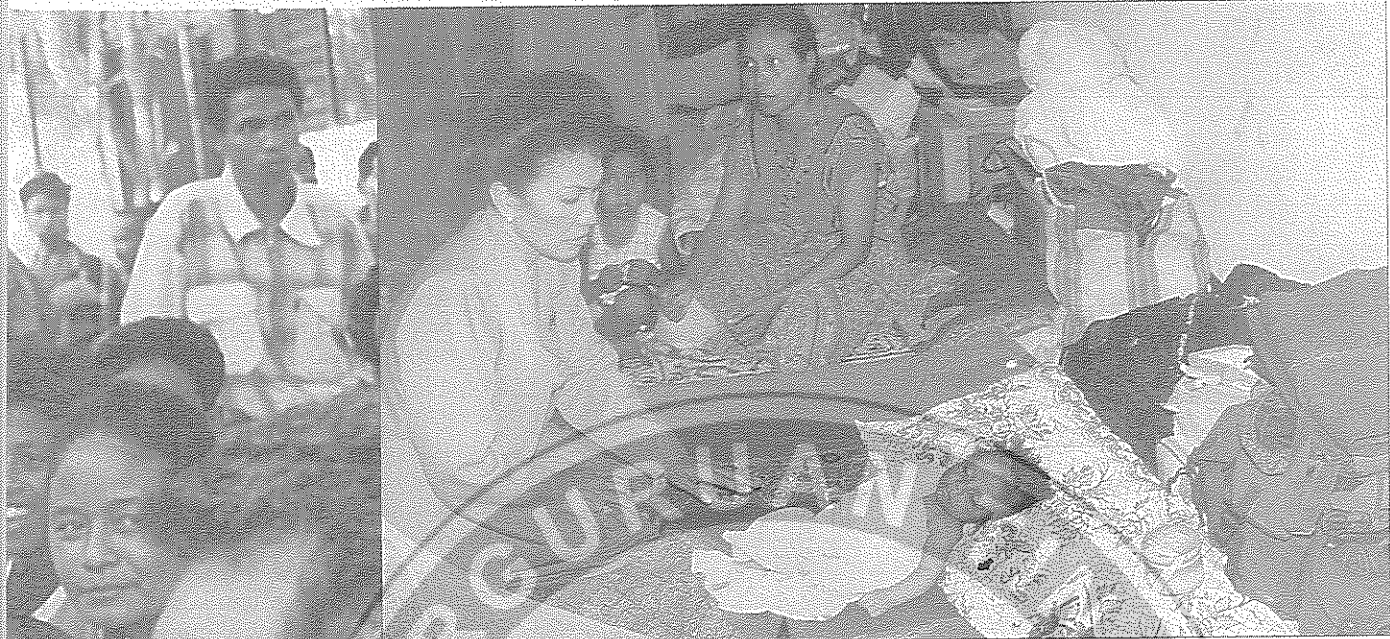
Jl. H. Agus Salim Gunung Complex Blok D No. 9 Semarang
 Telp. (024) 345718 Fax. (024) 315310

PT. Ceman Karya Tada Jl. Mulyawati 2426 Samarinda
 Telp. (0541) 41507 Fax. (0541) 41332

- Bandung
- Bekasi
- Balikpapan
- Lombok
- Medan
- Manado
- Pekanbaru
- Palembang
- Padang
- Pontianak
- Surabaya
- Semarang
- Samarinda



Derai Tangis Peng Warnai Kunjung Ketua Umum Bhaya

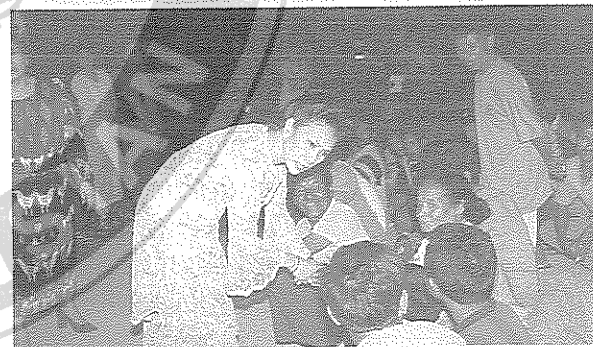


Derai tangis ibu Bhayangkari Polda Timor Timur yang mengungsi ke perbatasan NTT tertumpah saat bertatap muka dengan Ketua Umum Bhayangkari Ny. Pertiwi Roesmanhadi pada September 1999. Kepada 3.636 pengungsi yang berasal dari keluarga Polri, Ny. Roesmanhadi mengajak mereka agar tak terus bersedih hati, karena mereka tetap tinggal di tanah air sendiri, di mana setiap orang Indonesia berhak untuk menetap.

"Jangan khawatir, kami memperhatikan masa depan kalian semua, termasuk nanti dibangun rumah di tempat suami bertugas. Ini cobaan bagi kita semua. Ikhlasikan apa yang sudah ditinggalkan di Timtim untuk segera memulai hidup yang baru," ujarnya membesarkan hati para ibu yang, di antaranya menggendong putra dan putrinya.

Ketua Umum Bhayangkari bersama rombongan berada di NTT sejak Sabtu (25/9), hingga Selasa (28/9) untuk memperhatikan nasib pengungsi yang ditampung di Mapolda NTT, Sekolah Polisi Negara (SPN), Markas Kompi Brimob di Kupang, Mapolres Belu, dan Mapolres Soe (Kabupaten Timor Tengah Utara). Ikut mendampingi, Kepala Dinas Kedokteran dan Kesehatan (Kadisidokkes) Polri Brigjen Pol. dr. Pamudji Santoso, MSc, Kepala Sekolah Polisi Wanita Kol.

Jangan khawatir, kami memperhatikan masa depan kalian semua, termasuk nanti dibangun rumah di tempat suami bertugas. Ini cobaan bagi kita semua. Ikhlasikan apa yang sudah ditinggalkan di Timtim untuk segera memulai hidup yang baru.



pengungsi gan angkari



darurat bagi anak-anak keluarga Polri di tempat pengungsian, sehingga anak-anak tersebut tidak ketinggalan dalam menempuh pendidikan.

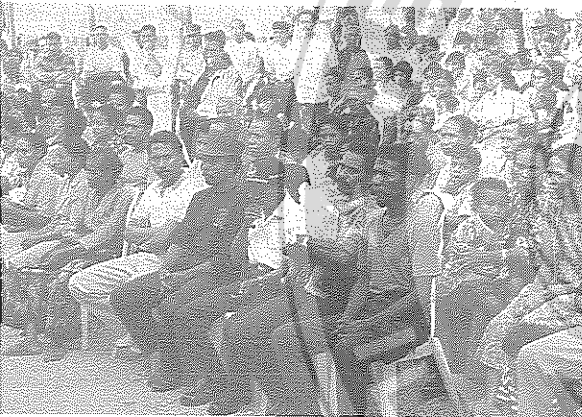
Ny Roesmanhadi juga berdialog dengan sejumlah ibu dan anak-anak yang berkumpul di halaman Mapolres Belu.

Serahkan Bantuan

Ketua Umum Bhayangkari menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para pengungsi, antara lain seragam sekolah, alat tulis, jerigen, rantang, tempat air minum, selimut dan ikan asin. Selain itu, rombongan juga meninjau pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh anggota polisi di Mapolres setempat. "Saat itu kami mengutamakan bantuan kepada keluarga Polri. Namun, nantinya juga menangani para pengungsi secara umum," ujarnya.

Kadisdokkes Brigjen Pol. Dr. Pamudji kepada wartawan mengatakan, pihaknya menerjunkan 14 dokter untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi. "Pengobatan yang kami lakukan juga bukan hanya untuk anggota Polri yang mengungsi melainkan untuk umum. Pelayanan dilakukan secara gratis bekerja sama dengan pihak Depkes setempat," katanya.

Selain meninjau para pengungsi guna memberikan bantuan, rombongan Ny. Roesmanhadi juga menggelar hiburan kepada anak-anak seperti bernyanyi, bermain sulap dan lawak. ■



kitar pukul 10.00 Wita dengan menumpang dua pesawat Cassa mendarat di Bandara Haliwen, selanjutnya rombongan menuju ke Mapolres setempat yang menampung para pengungsi, khususnya dari keluarga Polda Timtim.

Ny. Pertiwi Roesmanhadi berusaha membesarkan hati para pengungsi. Menurutnya keselamatan seluruh keluarga lebih utama dari pada harta benda yang bersifat duniawi. Kepada anak-anak dari keluarga Polda Timtim yang tinggal di wilayah Nusa Tenggara Timur segera diurus keperluan pendidikan sekolah, antara lain dengan menyelenggarakan sekolah

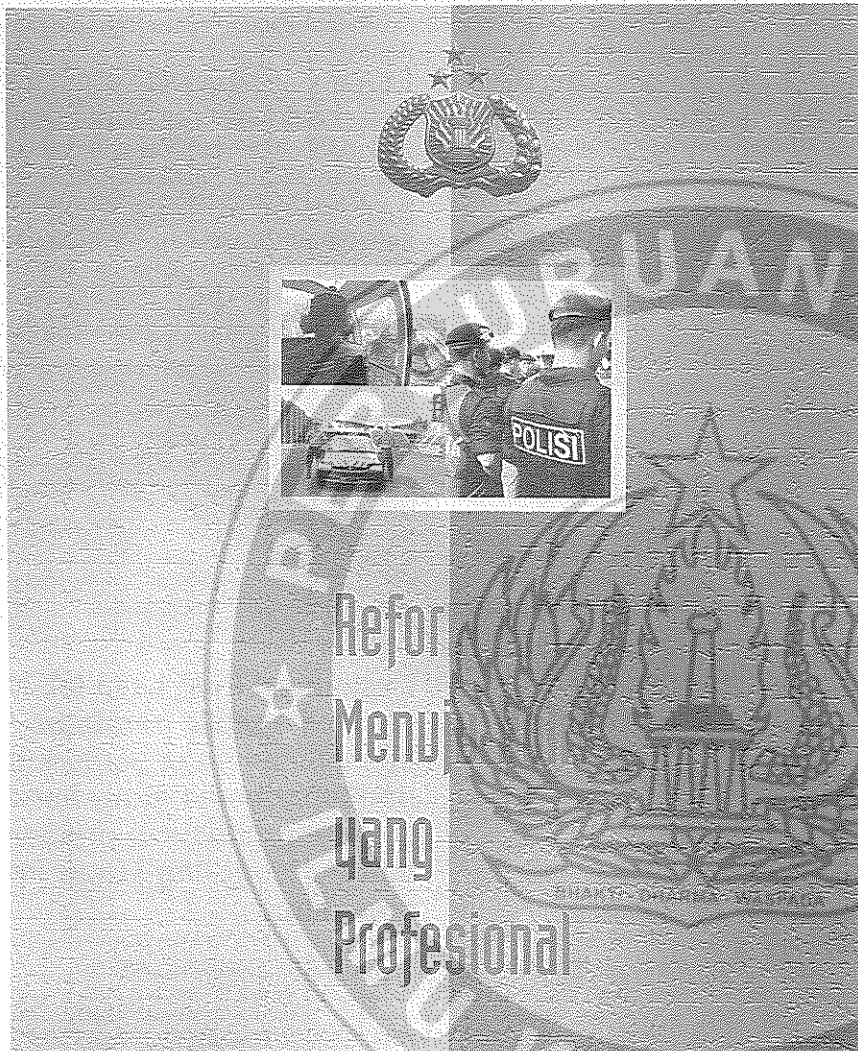
Di samping kami memberikan bantuan kepada keluarga Polri yang mengungsi, juga membantu meringankan derita para pengungsi umum.

Pol. Koesbandiyah Benjamin, Waka-dispen Polri Kol. Pol. Drs. Deddy SK, MBA, Ketua Bhayangkari Daerah Timtim Ny. Timbul Silaen dan Ketua Bhayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Ny. Yusuf Soedrajat serta Kapolres Belu Letkol Pol. Drs. Muhammad Nasir Achmad dan Dan-dim setempat, Letkol Inf. Sigit Yuwono.

Rombongan tiba di Atambua se-



Yang Perlu Anda tahu tentang "Buku Biru" Polri



Berbagai upaya telah dipersiapkan pimpinan Polri untuk menyongsong kemandirian dan profesionalisme Polri. Salah satu buku yang berisi konsepsi tentang kemana Polri akan melangkah menyongsong masyarakat madani, sesuai dengan tuntutan reformasi telah beredar 1 Juli 1999. Agar para anggota tidak tahu sekadar atau kulit luarnya saja tentang konsep Polri mandiri, Redaksi *Rastra* membuat cuplikan-cuplikan, beberapa isu penting:

Pahami 5 Hal

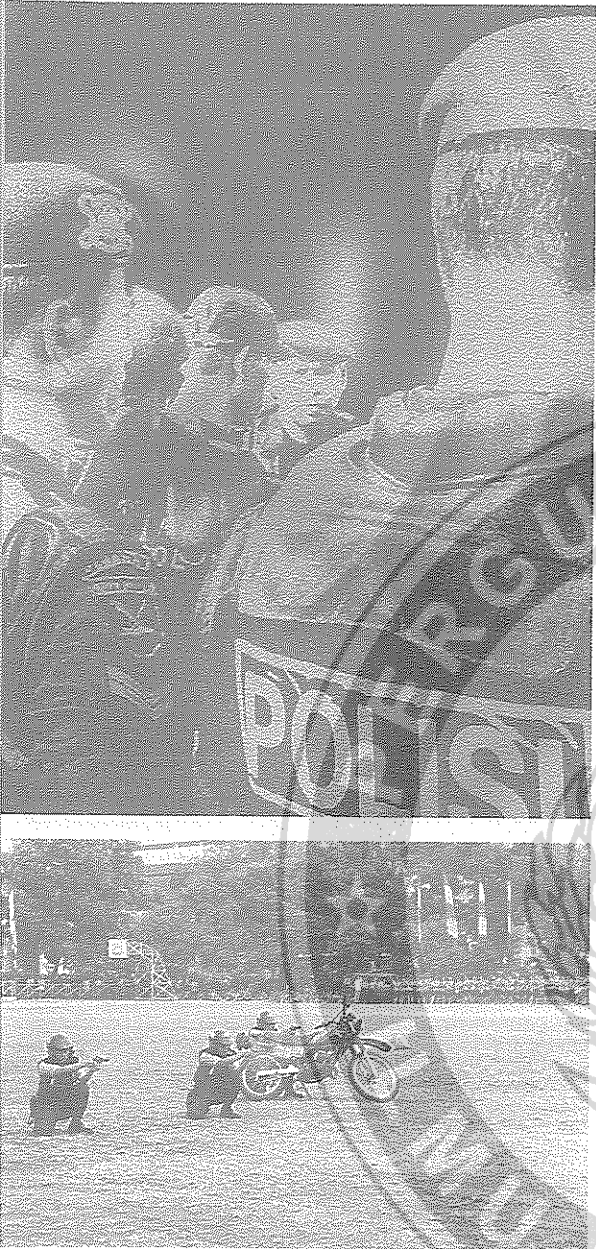
1. Bahwa pemisahan Polri dari struk-

tur ABRI sejak 1 April 1999 sebagai bagian dari proses reformasi haruslah dipandang dan disikapi secara arif sebagai tahapan untuk mewujudkan Polri sebagai abdi negara yang profesional dan dekat dengan masyarakat madani yang demokratis, aman, adil dan sejahtera.

2. Ketajaman dalam menangkap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian merupakan suatu keharusan. Kepekaan (sensitivitas) tersebut lebih diproyeksikan pada peningkatan kewaspadaan dan ketanggap-segeraan melalui

berbagai upaya antisipasi yang efektif dan proaktif serta mengembangkan model pemolisian yang berpihak kepada masyarakat (protagonis), berorientasi pada pemecahan masalah-masalah masyarakat dengan berbasis pada kedekatan pada masyarakat yang lebih manusiawi.

3. Bahwa masalah profesionalisme Polri mencakup masalah jatidiri Polri yang terkesan militeristik, kualitas intelektual pegawai Polri terutama Bintara/Tamtama yang lebih rendah dari rata-rata anggota masyarakat umum, sikap kerja yang kurang memperhatikan kekhasan masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan bukan karena kebutuhan masyarakat, dan kemandirian lembaga yang sering diintervensi oleh lembaga di luar Sistem Peradilan Pidana, di samping keterbatasan sumberdaya yang sangat berpengaruh kepada kualitas kemandirian dan profesionalisme Polri, sehingga diperlukan upaya perubahan baik aspek struktural, aspek instrumental dan aspek kultural guna mewujudkan Polri yang profesional.
4. Bahwa reformasi Polri diarahkan kepada perubahan aspek struktural berupa Polri yang otonom sebagai lembaga pemerintah nondepartemen langsung berada di bawah presiden, perubahan aspek instrumental terutama tentang perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 dan perubahan aspek kultural yang mencakup manajemen sumberdaya dan manajemen operasional serta sistem pengawasan oleh masyarakat.
5. Keberhasilan reformasi Polri bukan hanya ditentukan oleh Polri, tetapi juga oleh peran serta masyarakat terutama elit politik dalam mewujudkan Polri yang profesional, yang mampu menjawab



tantangan masa depan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.

Aspek Integral Reformasi Polri

Penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam era reformasi memerlukan penyesuaian dan perubahan aspek struktural, instrumental dan kultural dengan paradigma baru reformasi dan tantangan tugas masa depan. Hal tersebut akan berkaitan dengan jati diri organisasi (struktural), jati diri fungsi, otonomi kewenangan dan kompetensi (instrumental) serta jati diri sikap dan perilaku kepolisian (perorangan dan satuan) yang tercermin

dari budaya pelayanan kepolisian.

Jatidiri dan organisasi yang terkesan militeristik, yang terlihat dalam sikap dan prosedur pelayanan yang kaku, kualitas intelektual rata-rata Bintara dan Tamtama Polri yang lebih rendah dari anggota masyarakat umum, sikap dan metode kerja seragam yang kurang memenuhi kebutuhan khas masyarakat lokal, orientasi kerja yang hanya karena perintah atasan, bukan karena kebutuhan masyarakat, dan kekurang mandirian lembaga, akibat adanya intervensi lembaga eksternal di luar Sistem Peradilan Pidana memerlukan perubahan menuju kepada jatidiri sebagai abdi masyarakat, dengan kualitas intelektual di atas rata-rata anggota masyarakat umum, mempunyai sikap, metode dan orientasi kerja sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani, serta mandiri terbebas dari intervensi lembaga lain di luar Polri.

Di samping itu adanya berbagai keterbatasan di bidang sumber daya baik secara kuantitas, yang berpengaruh pula terhadap kualitas kemandirian dan profesionalisme Polri perlu mendapat perhatian untuk dapat diatasi/dicukupi.

Perubahan Aspek Struktural

Perubahan struktural akan mencakup perubahan kelembagaan (institusi) kepolisian dalam ketatanegaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

■ **Institusi:** Dari segi kelembagaan telah diakui bahwa penyelenggaraan fungsi kepolisian dalam ketatanegaraan oleh badan yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai perangkat lembaga pemerintah nondepartemen yang langsung berada di bawah presiden.

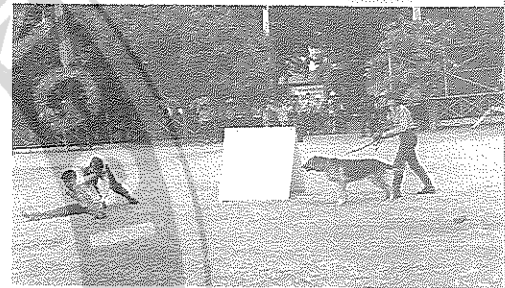
Dari segi kelembagaan, penyelenggaraan fungsi kepolisian bersifat otonom dan mandiri.

■ **Organisasi, susunan dan kedudukan.** Dari penelitian dan kegiatan ilmiah serta pendapat berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dengan status organisasi tersebut,

diharapkan Polri akan memiliki peluang yang lebih besar untuk lebih meningkatkan kinerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya organisasi Polri yang baru harus memuat prinsip-prinsip sebagai berikut :

●Kepolisian Negara Republik Indonesia menganut *integrated system* sebagai Kepolisian Nasioanal Indonesia. Pendekatan pengorganisasian Polri sebagai Polisi Nasional dilaksanakan secara *bottom up* dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas kepada kesatuan kewilayahan, terutama Polres sebagai Kesatuan Operasional Dasar (KOD) dan Polsek sebagai



Organisasi Polri akan lebih otonom apabila berstatus sebagai lembaga pemerintah nondepartemen yang berada langsung di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

ujung tombak operasional.

●Wilayah Hukum Kesatuan Kewilayahan Polri, disusun menyesuaikan pembagian wilayah pemerintahan daerah dan sistem peradilan pidana serta perkembangan masyarakat.

●Organisasi Polri disusun tanpa birokrasi yang panjang agar dapat menjamin pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sehingga masyarakat merasakan dan puas akan pelayanan Polri. Oleh karena itu organisasi Polri harus hemat struktur tetapi kaya fungsi.

●Struktur organisasi yang lebih bersifat *network* dan tidak selalu piramidal sehingga kerja sama terus dapat dikembangkan.

Perubahan Aspek Instrumental

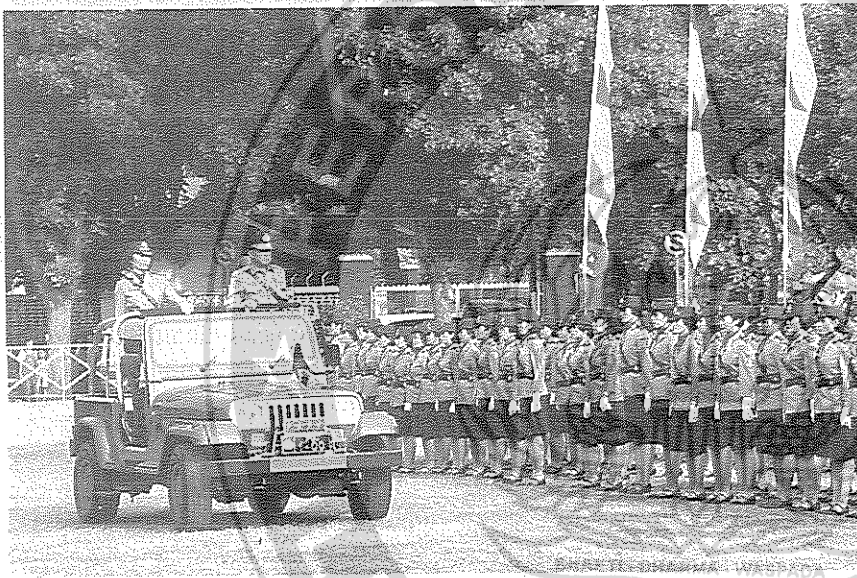
Perubahan aspek instrumental

akan mencakup filosofi (visi, misi dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

Filosofi: Disimak dari kandungan nilai Pancasila dan Tribrata secara filosofi memuat nilai-nilai kepolisian sebagai abdi utama, sebagai warga negara teladan dan wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat.

Visi Polri:

Alat negara penegak hukum; pemeliharaan keamanan dalam negeri yang profesional, dekat dengan masyarakat, bertanggung jawab dan



mempunyai komitmen terhadap masyarakat.

Misi Polri:

- Menegakkan hukum secara adil, bersih dan menghormati HAM.
- Memelihara keamanan dalam negeri dengan memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.
- Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.
- Mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Tujuan Polri:

Terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Doktrin Polri: Tata Tentrem Kerta Raharja

Sebelum berintegrasi dalam ABRI, doktrin Polri adalah *Tata Tentrem Kerta Raharja*. Dengan integrasi ABRI, semua doktrin Angkatan Perang dan Polri diintegrasikan dan diberlakukan doktrin ABRI. Dengan pemisahan Polri dari ABRI, maka Polri kembali pada doktrin *Tata Tentrem Kerta Raharja*.

Tata Tentrem Kerta Raharja berisi ajaran bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (*ra-*

harja) dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk membangun (*kerta*). *Kerta* hanya akan terwujud melalui pembinaan *tentrem* atau terwujudnya keamanan dalam negeri. Sedangkan *Tentrem* (yang mengandung dimensi *security, surety, safety* dan *peace*) hanya terwujud jika ada *tata* (ketertiban yang berdasarkan hukum).

Dengan doktrin ini perilaku yang menjunjung tinggi supremasi hukum, hak asasi manusia, budaya hukum menjadi acuan dalam mewujudkan keamanan dalam negeri.

Doktrin Polri, merupakan pandangan yang diyakini kebenarannya dan mempengaruhi perilaku anggota Polri dan atau kelompok pada organisasi dalam menjalankan misi untuk mencapai tujuan organisasi Polri.

* Aspek *inward looking*, bagian

doktrin Polri yang memuat tentang doktrin pembinaan Polri, bersifat pandangan tentang penyusunan kemampuan dan pembangunan kekuatan, yang sesuai dengan tuntutan tugas.

* Aspek *outward looking*, bagian doktrin Polri yang memuat tentang doktrin operasional Polri, mengidentifikasi bentuk-bentuk tugas, pengembangan sistem, metode, taktik dan teknik pelaksanaan tugas pokok, serta pandangan Polri tentang lingkungan (masyarakat) menurut pandangan operasional Polri.

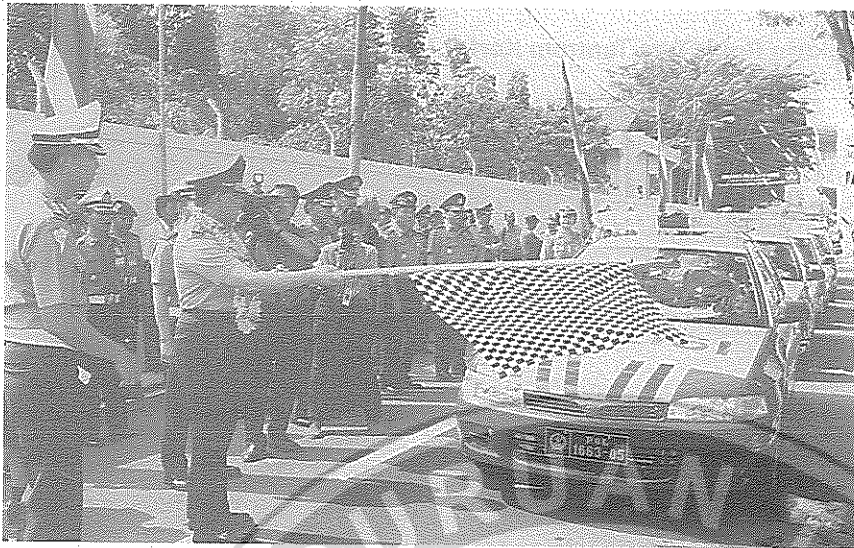
Kode Etik Polri

Selain instrumen hukum dan undang-undangan yang menjadi batasan sikap dan perilaku kedinasan Polri, masih diperlukan adanya kode etik Polri yang akan membimbing sikap dan perilaku yang memperhatikan etika profesi kepolisian baik perorangan maupun satuan.

Sebagai suatu profesi Polri memiliki kode etik Polri, suatu kode etik pada hakekatnya berisi nilai-nilai ideal tentang suatu profesi dan sekaligus *statement of guide line (code of conduct)* yang merupakan prinsip moral profesi kepolisian.

Kode Etik Polri berisi nilai ideal tentang Polri yang bersumber dari Pancasila, Tribrata dan Catur Prasatya. Nilai ideal tersebut pada dasarnya berupa jatidiri Polri sebagai: Abdi Sehati Nusa dan Bangsa (*Rastra sewa-kottama*) yang harus berbakti kepada negara dan bangsa/masyarakat Indonesia berdarma sebagai warga negara teladan dari negara (*Nagara Yanotama*) dan waspada sesuai hati nurani masyarakat dalam mendorong terelenggaranya kesadaran dan kepatuhan hukum (*Yana Anusasana Dharma*).

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam kode etik antara lain tentang: Pemuliaan profesi Kepolisian, batas-batas tugas dan kekuasaan kepolisian, prinsip-prinsip berhubungan dengan masyarakat, prinsip penggunaan upaya paksa, prinsip pengumpulan bukti dan informasi serta perawatan peralatan kepolisian. Untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi moral terhadap pelanggaran etika profesi kepolisian dilaksanakan oleh Komite Kode Etik Polri.



Perubahan Aspek Kultural

Perubahan aspek struktural dan aspek instrumental, bermuara pada aspek kultural karena kesemuanya harus terwujud dalam bentuk dan kualitas pelayanan aktual Polri terhadap masyarakat.

Aspek kultural menggambarkan budaya kepolisian yang akan secara langsung ditanggapi oleh masyarakat, dengan pujian, perasaan puas atau dengan celaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sikap dan perilaku Polri.

Rekrutmen

Satu hal yang banyak disorot dalam kajian kinerja dan profesional Polri ialah kualitas pegawai Polri. Sosok pegawai Polri dideskripsikan sebagai sosok yang korup, arogan, tidak profesional dan citra buruk lainnya. Faktor yang mendasar dalam ikut memberikan kontribusi pada kegagalan membentuk pegawai Polri yang profesional, bersih dan berbudaya ini ialah permasalahan rekrutmen.

Ke depan, rekrutmen pegawai Polri harus mampu menjaring bibit-bibit unggul, melalui motivasi yang menarik baik dari aspek kesejahteraan maupun peluang karier yang akan diperoleh setelah calon diterima menjadi pegawai Polri.

Calon-calon yang akan diseleksi diharapkan memenuhi persyaratan jujur, bertanggungjawab, rela berkurban bagi orang lain, penuh inisiatif, memiliki kestabilan emosi, dan nilai

kemanusiaan yang tinggi, mampu berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik, memiliki postur, fisik dan organ yang baik, serta memiliki tingkat intelegensia yang mampu belajar berbagai pelajaran secara cepat dan benar.

Untuk dapat menjaring calon yang terbaik dari para bibit unggul tadi, Polri akan menyempurnakan penyarungannya melalui metode yang lebih tepat dan benar, antara lain calon memiliki pendidikan umum diutamakan sarjana atau minimal SLTA, memanfaatkan institusi lain yang lebih profesional untuk menjamin objektivitas penilaian, prinsip *local boy for the local job* khususnya untuk mengisi pegawai petugas lapangan Polri, menyelenggarakan *talent scouting* yang lebih cermat, melalui pemberdayaan sub-sub panitia penerimaan, mengadakan pengawasan yang baik untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dalam proses penerimaan.

Di sisi lain dimungkinkan adanya sistem penerimaan pegawai tidak tetap (*out sourcing*) berdasarkan kebutuhan organisasi, sehingga diharapkan akan diperoleh fleksibilitas untuk mengangkat kembali pegawai yang produktivitasnya tinggi/profesional dan memutus kontrak terhadap pegawai yang tidak produktif.

Sistem Pendidikan Polri

Sistem pendidikan Polri yang selama ini diwarnai nuansa militer, berdampak kepada sikap perilaku pe-

gawai Polri yang arogan, tidak profesional, sehingga tidak disukai masyarakat.

Sebagai upaya mewujudkan pegawai Polri yang profesional dan berbudaya, serta mampu mengimbangi tingkat pendidikan masyarakat maka sistem pendidikan Polri disusun berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui pengembangan Ilmu Kepolisian, yang saat ini memiliki konsorsium ilmu kepolisian di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Berbagai substansi pendidikan dan latihan Polri akan direorientasi, termasuk kurikulum pada setiap jenis pendidikan Polri dengan berbagai materi yang terkait erat dengan profesi kepolisian, antara lain penguasaan masalah HAM, demokratisasi dan lingkungan hidup, kemampuan dialog interaktif maupun muatan lokal/budaya setempat.

Untuk dapat menjadi pegawai Polri, saat ini masih diselenggarakan melalui tiga pintu. Sejalan dengan tuntutan reformasi untuk mewujudkan polisi yang profesional maka penyelenggaraan pendidikan akan diarahkan melalui dua pintu, yaitu untuk setingkat petugas lapangan Polri (*police worker*) dan setingkat penyelia lapangan Polri (*first line supervisor*), dan selanjutnya menuju ke sistem satu pintu. Sebelum diangkat menjadi pegawai Polri, maka terlebih dahulu diberikan kesempatan magang sebagai upaya pembentukan mental kepribadian calon pegawai Polri yang baik. Bagi yang tidak memenuhi syarat akan dikeluarkan, bagi yang memenuhi syarat akan dilantik menjadi pegawai Polri yang ditandai dengan pengucapan sumpah dan pernyataan penerimaan Kode Etik Polri.

Jenjang pendidikan Polri disusun untuk memperoleh kemampuan/kualifikasi keahlian melalui pola pendidikan strata 1, 2 dan 3 serta kerja sama pendidikan baik dalam maupun luar negeri. Kualifikasi ketrampilan melalui pola pendidikan D1 untuk setingkat petugas lapangan Polri (*police worker*), D3 untuk setingkat penyelia lapangan Polri (*first line supervisor*), serta melalui kejuruan. Kualifikasi manajerial melalui pola pendidikan manajerial tingkat menengah, tingkat atas. ■